



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2026



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Mei 2024

Nomor : 865 / 2328
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Revisi IKU Disperakim Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026

Kepada :
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti hasil Desk Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Aula Gedung PKK Jalan Letjend Suprpto, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang, bersama ini kami sampaikan Revisi Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



IG ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Pertinggal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

- Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Tugas Pokok

: Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan
- Fungsi

:

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.
- | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Tujuan 1 : | | |
| Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat | Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi | <div><div>Alasan Pemilihan Indikator:</div><div>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah</div><div>Formulasi Pengukuran:</div><div>Jumlah Rumah Layak Huni Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Total Rumah dikali 100%</div><div>Tipe Penghitungan:</div><div>Non Kumulatif (Progres Positif)</div><div>Sumber Data:</div><div>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</div><div>Penanggung Jawab :</div><div>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</div></div> |

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Agregat Penanganan Kawasan Kumuh Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Total Kumuh Tahun 2018-2022 dikali 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 1 :		
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah Pengananan RTLH Miskin Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah RTLH Miskin baseline Tahun 2022 • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penyediaan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah Pemenuhan Backlog Miskin Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Backlog Miskin baseline Tahun 2022 • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Agregat Penurunan Kawasan Kumuh Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Total Kumuh Tahun 2018-2022 dikali 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Negatif) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tujuan 2 :		
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: (Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi / Jumlah pengajuan pengadaan tanah) x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Pengulangan) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
	Persentase Reforma Agraria yang difasilitasi	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan penataan aset dan akses yang difasilitasi di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah fasilitasi pelaksanaan

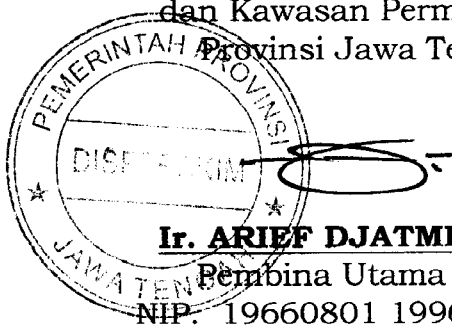
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Reforma Agraria / Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) x 100% • Tipe Penghitungan: Pengulangan • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 2 :		
Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Terseselaikannya Penetapan Lokasi dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah pengajuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi / Jumlah pengajuan pengadaan tanah) x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Pengulangan) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah penataan aset dan akses yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: (Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/ Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Pengulangan) • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tujuan 3 :		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini yang dapat menggambarkan kinerja birokrasi secara komprehensif baik di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah. Indeks RB perangkat daerah juga dipilih dalam rangka mendukung pencapaian Indeks RB di tingkat pemerintah daerah yang tertuang sebagai indikator sasaran pembangunan daerah • Formulasi Pengukuran: (Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 3.1		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat pelayanan setiap perangkat daerah kepada masyarakat atau publik sesuai dengan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah sebagai pelayan bagi publik atau masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Total (Nilai komponen MR x Bobot) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 3.2		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini merupakan indikator baru yang diterapkan untuk semua perangkat daerah dalam rangka mendorong setiap perangkat daerah untuk mampu

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		menerapkan manajemen risiko dalam proses perencanaan sampai implementasi. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian perangkat daerah. • Formulasi Pengukuran: Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Mei 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 29 April 2024

Nomor : 000.8.6.3/1566
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : IKU Disperakim Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026

Kepada :
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti surat dari Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8.6.3/53 Tanggal 23 April 2024 hal Permintaan Data Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka akan disusun Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Pertinggal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

- Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Tugas Pokok

: Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan
- Fungsi

: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- :
 1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 :		
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah Rumah Layak Huni Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Total Rumah dikali 100% • Tipe Penghitungan: Progres Positif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Agregat Penanganan Kawasan Kumuh Tahun $N+(N-1)$ dibagi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Jumlah Total Kumuh Tahun 2018-2022 dikali 100% • Tipe Penghitungan: Progres Positif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Sasaran 1 :		
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah Pengurangan RTLH Miskin Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah RTLH Miskin baseline Tahun 2022 • Tipe Penghitungan: Progres Positif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penyediaan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah Pemenuhan Backlog Miskin Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Backlog Miskin baseline Tahun 2022 • Tipe Penghitungan: Progres Positif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Agregat Penurunan Kawasan Kumuh Tahun $N+(N-1)$ dibagi Jumlah Total Kumuh Tahun 2018-2022 dikali 100% • Tipe Penghitungan: Progres Negatif

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Tujuan 2 :		
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: (Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi / Jumlah pengajuan pengadaan tanah) x 100% • Tipe Penghitungan: Pengulangan • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
	Persentase Reforma Agraria yang difasilitasi	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan penataan aset dan akses yang difasilitasi di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria / Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) x 100% • Tipe Penghitungan: Pengulangan • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Sasaran 2 :		
Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Terselesaikannya Penetapan Lokasi dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah pengajuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi / Jumlah pengajuan pengadaan tanah) x 100% • Tipe Penghitungan: Pengulangan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah penataan aset dan akses yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran: (Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/ Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) x 100% • Tipe Penghitungan: Pengulangan • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Semarang, 29 April 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

**BERITA ACARA DESK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (21 - 05 - 2024) bertempat di Gedung Monumen PKK Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjen Suprpto, Ungaran, Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan desk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil menyepakati IKU / perlu adanya perbaikan IKU:

Adapun IKU hasil desk Sebagaimana terlampir link <https://tinyurl.com/IKUOPD24-26>

Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Tipe Perhitungan nya menggunakan non komulatif (Progres Positif/ Progres Negatif / Pengulangan).
2. Untuk dapat memasukan IKU yang urusan penunjang Sesuai dengan Permenpan 10 tahun 2010.

Demikian laporan yang bisa kami sampaikan perihal kegiatan ini untuk digunakan seperlunya.

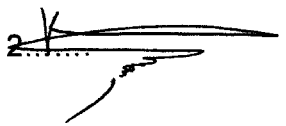
Ungaran, 21 Mei 2024

NO. NAMA

Tanda Tangan

1. Lingga Bayu Candrawira (Bangda)
2. Muhammad Bagus Samudra (Bappeda)
3. Arya Primanda (Biro Organisasi)
4. Masyitha Putri (Disperakim)
5. Zunita Isna Maria Ulfah (Disperakim)

1....

2....

3....

4....

5....